

**PENGELOLAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DALAM PERSPEKTIF
GOOD SCHOOL GOVERNANCE DI SMP NEGERI 1 PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ade Tutty R Rosa¹, Cynthia Rizki Fitrianti Yahya², Delfi Dwinanda Kardiwan³,
Fatmawati⁴, Rahmat Hidayat⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Nusantara

1adetuttyrosa@uninus.ac.id, 2cynthiarfyahya@gmail.com, ³
delfidwinandakardiwan@gmail.com, ⁴nengfatma1412@gmail.com,
⁵kotorahmathidayat@gmail.com

ABSTRACT

The Student Admission System (SPMB) is a strategic public education service that serves as the initial gate for public access to quality education. The implementation of SPMB is not only required to fulfill administrative aspects, but must also reflect the principles of good school governance (Good School Governance/GSG). This study aims to analyze the management of SPMB in the perspective of Good School Governance at SMP Negeri 1 Pasawahan, Purwakarta Regency. This study used a qualitative approach with a case study method. Research informants included the school principal, the SPMB committee, teachers, school operators, the school committee, parents of students, and school supervisors. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña model which included data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the management of SPMB was carried out through the stages of planning, organizing, implementing, and supervising that referred to government regulations. The principle of transparency is realized through the provision of open information to the public. Accountability is demonstrated through reporting and activity documentation mechanisms. Public participation can be seen from the involvement of school committees and parents in the socialization process. Responsiveness is realized through information and complaint services. The effectiveness of SPMB implementation is supported by the use of information technology. Supporting factors include the commitment of school members, technological support, and coordination with the education department, while inhibiting factors include the limited digital literacy of some communities and dynamic regulatory changes. This study recommends strengthening information systems, increasing public digital literacy, and developing an SPMB model based on Good School Governance.

Keywords: Student Admission System, Good School Governance, Educational Management

ABSTRAK

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan salah satu layanan publik pendidikan yang strategis karena menjadi gerbang awal akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan SPMB tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik (Good School Governance/GSG). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan SPMB dalam perspektif Good School Governance di SMP Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, panitia SPMB, guru, operator sekolah, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pengawas sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SPMB dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengacu pada regulasi pemerintah. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas ditunjukkan melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kegiatan. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam proses sosialisasi. Responsivitas diwujudkan melalui layanan informasi dan pengaduan. Efektivitas pelaksanaan SPMB didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Faktor pendukung meliputi komitmen warga sekolah, dukungan teknologi, dan koordinasi dengan dinas pendidikan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat serta perubahan regulasi yang dinamis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem informasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengembangan model SPMB berbasis Good School

Kata Kunci: Sistem Penerimaan Murid Baru, Good School Governance, Manajemen Pendidikan

A. Pendahuluan

Perubahan kebijakan pendidikan nasional menempatkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan akses, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan yang

berkeadilan. Kebijakan ini merupakan implementasi transformasi sistem penerimaan peserta didik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yang menekankan prinsip objektivitas, transparansi,

akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi dalam proses penerimaan murid baru. SPMB tidak lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisme administratif untuk menyeleksi calon peserta didik, melainkan sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mampu menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam perspektif administrasi dan manajemen pendidikan, pengelolaan SPMB merupakan bagian integral dari fungsi manajemen sekolah yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sebagaimana dikemukakan oleh Terry (2019) dan diperkuat oleh Fayol yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Mulyasa (2022) menjelaskan bahwa manajemen sekolah yang efektif menuntut kemampuan kepala sekolah dalam

mengelola seluruh sumber daya pendidikan secara sistematis, termasuk penyelenggaraan penerimaan murid baru yang menjadi gerbang awal penyelenggaraan layanan pendidikan. Wahjosumidjo (2021) juga menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan pendidikan melalui koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap seluruh program sekolah.

Keberhasilan pengelolaan SPMB sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Hidayat dan Machali (2020) menyatakan bahwa tata kelola pendidikan yang baik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, OECD (2019) menjelaskan bahwa tata kelola pendidikan yang efektif menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, koordinasi antarpanitia, kesiapan teknologi informasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian oleh Arifin (2022) menemukan bahwa perencanaan yang matang dan koordinasi lintas pemangku kepentingan mampu meminimalkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian Suryadi (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem penerimaan peserta didik meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat transparansi proses seleksi. Sementara itu, penelitian Prasetyo dan Nugroho (2024) menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik serta mekanisme pengaduan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

Konsep Good School Governance merupakan adaptasi prinsip *good governance* ke dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Menurut Caldwell dan Spinks (2013),

Good School Governance menempatkan sekolah sebagai organisasi publik yang wajib mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, berkeadilan, serta taat terhadap regulasi.

Berbagai penelitian mengenai implementasi Good School Governance menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. Penelitian Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan sekolah berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat. Penelitian Rahmawati (2023) menemukan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sekolah. Penelitian lain oleh Sari dan Hamid (2024) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip Good School Governance dalam proses penerimaan peserta didik baru mampu mengurangi potensi konflik, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan sekolah.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis

pengelolaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui perspektif Good School Governance pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan SPMB tahun 2025, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi PPDB berbasis zonasi, sedangkan perubahan kebijakan menuju SPMB membawa konsekuensi terhadap mekanisme tata kelola, sistem pelayanan publik, dan strategi manajemen sekolah yang memerlukan kajian lebih mendalam. SMP Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang memiliki jumlah peminat relatif tinggi setiap tahun. Tingginya animo masyarakat tersebut menjadi tantangan bagi sekolah dalam menyelenggarakan SPMB secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dalam perspektif Good School Governance di SMP Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai

implementasi tata kelola penerimaan murid baru yang efektif dan berintegritas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses pengelolaan SPMB dalam konteks yang alami.

Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri atas kepala sekolah, ketua panitia SPMB, operator sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis meliputi petunjuk teknis SPMB, surat keputusan panitia, laporan pelaksanaan, data pendaftar, serta dokumen evaluasi kegiatan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui

triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, dan audit trail.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses perencanaan SPMB di SMP Negeri 1 Pasawahan diawali dengan koordinasi intensif bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta guna mendapatkan arahan serta Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan resmi. Implementasi juknis tersebut dirumuskan ke dalam pembentukan susunan Panitia SPMB dan penyusunan program kerja yang komprehensif. Pihak-pihak yang dilibatkan secara aktif dalam penyusunan draf perencanaan ini mencakup Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Operator Sekolah, serta jajaran guru yang ditunjuk. Dalam menentukan daya tampung peserta didik baru, pihak sekolah mendasarkannya pada pertimbangan rasio jumlah ruang kelas yang tersedia serta kepatuhan mutlak terhadap anjuran kuota dari Dinas Pendidikan. Untuk penentuan jadwal kegiatan, Ketua Panitia menegaskan bahwa seluruh lini waktu merujuk langsung pada Surat Edaran dan Juknis SPMB yang kemudian disesuaikan dengan kondisi riil serta kesiapan operasional internal sekolah.

Perencanaan merupakan tahapan inisiasi awal yang sangat krusial dan menjadi determinan utama dalam menentukan roda keberhasilan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 Pasawahan. Ditinjau dari perspektif *Good School Governance* (GSG), sebuah perencanaan yang matang tidak boleh dilakukan secara tertutup atau sepihak oleh otoritas internal sekolah saja, melainkan wajib diselenggarakan secara transparan serta melibatkan kontribusi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Keterbukaan informasi publik yang dibangun secara masif sejak fase awal ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap eskalasi kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada kredibilitas institusi sekolah. Hasil penelitian empiris di lapangan menegaskan bahwa jalinan kerja sama lintas sektoral yang harmonis antara pihak manajemen sekolah, komite sekolah selaku representasi orang tua, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam merumuskan draf daya tampung rombongan belajar serta penyusunan lini masa jadwal pendaftaran, telah mencerminkan penegakan asas

kepatuhan hukum (*rule of law*) yang murni. Manifestasi dari sinergi ini melahirkan sebuah transparansi institusional yang kokoh dan matang sejak program digulirkan, sehingga meminimalkan potensi terjadinya distorsi informasi maupun praktik maladministrasi di kemudian hari.

Struktur kepanitiaan SPMB di SMP Negeri 1 Pasawahan dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kompetensi dan kesiapan fisik maupun mental para guru yang ditunjuk. Struktur formal kepanitiaan dipimpin oleh Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab, yang dibantu oleh Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, Tim Verifikator, Operator Sistem, dan Tim Helpdesk (Layanan Informasi). Sistem koordinasi antaranggota panitia di lapangan didesain menggunakan pola pelaporan berjenjang yang berbasis komunikasi intensif. Setiap lini tugas yang menemui dinamika atau kendala teknis wajib melapor kepada Ketua Panitia, yang kemudian mengonsolidasikan laporan tersebut untuk diteruskan langsung kepada Kepala Sekolah maupun berkoordinasi horizontal ke pihak Dinas Pendidikan apabila sistem

aplikasi mengalami gangguan (*trouble*).

Pengorganisasian yang bermutu tinggi di SMP Negeri 1 Pasawahan diwujudkan secara konkret melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah mengenai pembentukan kepanitiaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bertujuan untuk menegakkan asas akuntabilitas, merumuskan pembagian kerja yang jelas, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif, responsif, dan terukur. Dalam implementasi operasionalnya di lapangan, panitia memisahkan fungsi kerja ke dalam klaster-klaster spesifik secara profesional, di mana tim verifikator berfokus penuh pada validasi keaslian dokumen fisik maupun digital pendaftar, operator sistem bertanggung jawab mutlak atas kelancaran input data pada aplikasi web terpusat, dan tim *helpdesk* berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi serta mendampingi orang tua murid yang menghadapi kendala literasi digital. Spesialisasi peran yang ketat ini secara efektif mampu mengeliminasi potensi terjadinya tumpang tindih otoritas (*overlapping authority*) yang sering menjadi pemicu kelambatan

birokrasi, sehingga melalui model koordinasi berjenjang yang ramping dan lincah (*agile governance*) ini, setiap dinamika teknis lapangan dapat langsung diselesaikan dengan cepat demi menciptakan tata kelola internal organisasi yang bersih, efisien, dan kredibel sesuai dengan marwah prinsip *Good School Governance* (GSG).

Mekanisme pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 Pasawahan diwujudkan melalui sistem transformasi digital secara penuh (*full online*) dengan mengintegrasikan sistem aplikasi berbasis web terpusat yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Cetak biru alur pendaftaran dalam sistem ini mewajibkan seluruh calon peserta didik yang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan pemindaian dan pengunggahan berkas dokumen persyaratan secara mandiri dari rumah melalui portal web resmi, yang secara teknis memangkas rantai birokrasi tatap muka. Guna mengimbangi transisi sistem berbasis elektronik tersebut, manajemen sekolah meluncurkan strategi sosialisasi informasi secara masif, agresif, dan terstruktur dengan

mengeksploitasi berbagai platform media digital modern, mulai dari konten kreatif di akun TikTok, pembaharuan berkala di feed Instagram, hingga pemuatan panduan teknis pada situs web resmi sekolah. Konvergensi media sosialisasi ini terbukti membuahkan dampak positif di lapangan; berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu orang tua pendaftar, seluruh bauran saluran penyebaran informasi yang disediakan sekolah dinilai berjalan sangat efektif karena mampu membangun pemahaman yang komprehensif bagi publik. Informan tersebut memaparkan pengalaman empirisnya bahwa masyarakat umum dapat memperoleh kejelasan regulasi secara berjenjang dan runtut melalui pendampingan intensif dari para operator SD asal, pemantauan infografis di akun Instagram resmi SMP Negeri 1 Pasawahan, hingga penyediaan papan pengumuman fisik konvensional di area sekolah bagi wali murid yang datang meninjau langsung ke lokasi. Melalui ketersediaan diversifikasi ragam kanal komunikasi digital yang dikombinasikan dengan media fisik tersebut, penyampaian informasi SPMB bertransformasi menjadi model layanan publik yang

sangat akomodatif, inklusif, transparan, serta mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat umum lintas generasi.

Guna menjamin keadilan akses, sekolah menyediakan layanan pendampingan offline di lingkungan sekolah. Layanan ini difungsikan sebagai helpdesk fisik untuk memfasilitasi para orang tua atau operator SD asal yang mengalami gagap teknologi, keterbatasan akses internet, atau kendala pemahaman sistem IT. Pada penerapannya di lapangan, salah satu orang tua murid mengaku bahwa proses adaptasi sistem digital ini sempat dirasakan "gampang-gampang susah" dan agak rumit pada tahap awal pengisian berkas. Namun, kehadiran asistensi dari operator sekolah asal serta kesiapan tim helpdesk internal panitia sangat membantu kelancaran pengunggahan dokumen pendaftaran hingga tuntas.

Proses verifikasi dokumen pendaftaran di SMP Negeri 1 Pasawahan dibagi ke dalam empat jalur seleksi utama secara ketat untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jalur Afirmasi ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan syarat

verifikasi kartu kesejahteraan (PKH/PIP) yang divalidasi silang melalui data DTKSN desil 1 sampai 4. Jalur Domisili (Zonasi) ditentukan secara objektif berdasarkan jarak geografis antara kediaman calon siswa dengan sekolah. Sementara itu, Jalur Prestasi/Kejuaraan membagi klaster penilaian ke dalam kategori akademik (seperti nilai rapor, TKA, dan OSN) serta non-akademik (O2SN, FLS2N, FTBI, Pentas PAI, kepanduan, dan keagamaan) melalui proses validasi sertifikat resmi. Terakhir, Jalur Perpindahan (Mutasi) dan Anak Guru/Tenaga Pendidik memverifikasi dokumen kedinasan berupa Surat Keputusan (SK) penugasan orang tua yang resmi.

Melalui implementasi mekanisme penyaringan yang berjalan secara presisi, objektif, dan berbasis sistem digital terpadu ini, seluruh kuota pendaftaran yang telah dialokasikan oleh sekolah berhasil terpenuhi secara akuntabel dan transparan tanpa menyisakan celah sekecil apa pun bagi adanya praktik manipulasi bangku kosong di luar prosedur resmi. Seluruh capaian riil kuota pendaftaran yang terverifikasi secara sistemik dirangkum ke dalam tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Implementasi Indikator Keberhasilan Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 1 Pasawahan

Jalur Seleksi Utama	Sub-Jalur Seleksi	Target Kuota (Siswa)	Hasil Pendaftar (Siswa)	Capaian Diterima (Siswa)	Sisa Kuota (Siswa)
Domisili	Domisili / Zonasi Utama	261	261	261	0
Afirmasi	Afirmasi Ekonomi / Khusus	76	76	76	0
Pindahan	Perpindahan Tugas Orang Tua	2	2	2	0
	Mutasi	0	0	0	0
	Anak Guru/ Ten dik	9	9	9	0
Prestasi Akademik	Rapor + TKA	23	23	23	0
	OSN	1	1	1	0
	Sains Non-Kementerian	0	0	0	0
Prestasi Non-Akademik	O2SN, FLS2N, FTBI, Pentas PAI	4	4	4	0
	Kepanduan	0	0	0	0
	Keagamaan & Non-Kementerian	4	4	4	0
Total Keseluruhan	Semua Jalur Seleksi	380	380	380	0

Berdasarkan Tabel 1, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 Pasawahan menunjukkan tingkat keterisian daya tampung sebesar 100%, dengan 380 calon murid dinyatakan diterima sesuai kuota yang tersedia. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan kebutuhan rombongan belajar dan distribusi kuota pada setiap jalur telah dilaksanakan secara efektif. Tidak adanya sisa kuota juga menunjukkan bahwa mekanisme seleksi mampu mengakomodasi seluruh kapasitas yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan kekosongan daya tampung.

Efektivitas tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh ketercapaian kuota, tetapi juga oleh pemanfaatan sistem pendaftaran berbasis web yang mendukung pengelolaan data secara terintegrasi. Digitalisasi proses pendaftaran berkontribusi terhadap efisiensi administrasi, mempercepat proses verifikasi, serta mengurangi peluang terjadinya intervensi di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak sekadar berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi menjadi instrumen penguatan tata kelola yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hasil wawancara dengan orang tua peserta didik menunjukkan bahwa proses pelayanan pada pelaksanaan SPMB tahun penelitian dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada aspek komunikasi antara panitia, operator sekolah, dan masyarakat. Perbaikan kualitas komunikasi tersebut mengurangi ketidakpastian informasi selama proses pendaftaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan SPMB. Dengan demikian, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan

proses administrasi, tetapi juga oleh kemampuan sekolah membangun komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Distribusi peserta didik pada setiap jalur penerimaan juga menunjukkan implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan SPMB. Terpenuhinya kuota pada jalur domisili dan afirmasi mengindikasikan bahwa sekolah melaksanakan ketentuan penerimaan sesuai regulasi yang berlaku. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kuota, tetapi juga pada pemberian akses pendidikan kepada kelompok sasaran sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah. Dengan demikian, prinsip *equity* dalam Good School Governance tercermin melalui pelaksanaan seleksi yang memperhatikan aspek pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Pada aspek pengawasan, penelitian menemukan bahwa mekanisme pengendalian tidak hanya dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan panitia SPMB, tetapi juga melibatkan pengawas pembina, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta,

dan komite sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya sistem pengawasan berlapis (*multi-level supervision*) yang memperkuat objektivitas pelaksanaan seleksi. Pengawasan eksternal berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* untuk memastikan bahwa seluruh tahapan SPMB dilaksanakan sesuai ketentuan dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Proses penanganan pengaduan juga menunjukkan adanya mekanisme tata kelola yang sistematis. Setiap keluhan terlebih dahulu diidentifikasi sumber permasalahannya, kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait sebelum ditetapkan alternatif penyelesaiannya. Pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga kepentingan para pemangku kepentingan.

Prinsip transparansi terlihat pada penyampaian hasil seleksi secara terbuka melalui sistem daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Publikasi hasil seleksi yang dapat

diakses oleh seluruh pendaftar memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai status penerimaan. Transparansi informasi tersebut memperkuat akuntabilitas proses seleksi karena setiap keputusan dapat ditelusuri berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan. Selain itu, penyusunan laporan pelaksanaan dan evaluasi SPMB yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi berlanjut pada evaluasi sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPMB pada periode berikutnya.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala teknis berupa ketidakstabilan sistem aplikasi pada awal masa pendaftaran. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian orang tua mengalami kesulitan mengakses layanan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap proses pendaftaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola berbasis digital tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia di sekolah, tetapi juga oleh keandalan infrastruktur teknologi yang

mendukung sistem SPMB. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas server, optimalisasi sistem informasi, dan penyediaan layanan bantuan teknis menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SPMB pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SPMB di SMP Negeri 1 Pasawahan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good School Governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya tercermin dalam kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga dalam mekanisme pelayanan, pengawasan, pengelolaan informasi, dan evaluasi yang mendukung terciptanya tata kelola sekolah yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik pendidikan.

D. Kesimpulan

Pengelolaan SPMB di SMP Negeri 1 Pasawahan Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Good School Governance. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan SPMB yang berkualitas. Berdasarkan temuan kuantitatif pada Tabel 1, tingkat keterisian daya tampung sekolah mencapai angka mutlak (380 siswa diterima dari 380 kuota) yang terbagi merata di seluruh jalur seleksi tanpa menyisakan celah kursi kosong di luar sistem. Data kualitatif wawancara mempertegas bahwa keterbukaan pengumuman hasil harian berkala serta kehadiran helpdesk luring sangat efektif dalam membangun kepercayaan publik dan menegakkan asas keadilan layanan.

Rekomendasi kritis utama ditujukan pada penguatan stabilitas server aplikasi pendaftaran agar kendala teknis berupa *error* sistem pada awal pendaftaran tidak terulang, sehingga kualitas tata kelola sistem penerimaan murid baru dapat terus ditingkatkan berkelanjutan pada periode tahun-tahun ajaran mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). London, England: SAGE Publications.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (2013). *The self-transforming school*. London, England: Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sagala, S. (2018). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2019). *Principles of management*. New Delhi: AITBS Publishers.
- Usman, H. (2020). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan* (5th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2020). *Kepemimpinan kepala sekolah: Tinjauan teoretik dan permasalahannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Jurnal :

bdullah, A., & Burhanuddin, B. (2023). Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan *good governance* di sekolah. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 287–295.

Maharani, S. P., Sofiyanti, I., Arba, I. A., Nugraha, R. F., & Suhardi. (2025). Transformasi seleksi peserta didik dari PPDB menuju Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025. *Jurnal Basicedu*, 9(3), 2456–2468.

Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis kebijakan pendidikan di bidang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis domisili dan problematikanya. *Jurnal Niara*, 18(1), 115–129.

Sujari. (2022). Manajemen kepala sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 1(2), 45–56.

Suryanthi, I. G. A. E., Atmadja, A. T., & Purnamawati, I. G. A. (2024). Pengaruh *good school governance* terhadap kualitas pendidikan di tingkat sekolah. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 26–48.